

# Model Kematangan UKPBJ

Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan  
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
2019

## Latar Belakang

1

### **Kelembagaan UKPBJ**

Kelembagaan UKPBJ belum sesuai dengan amanat perundangan



2

### **Sumber Daya Manusia UKPBJ**

SDM UKPBJ belum profesional



3

### **Tata Laksana & Manajemen UKPBJ**

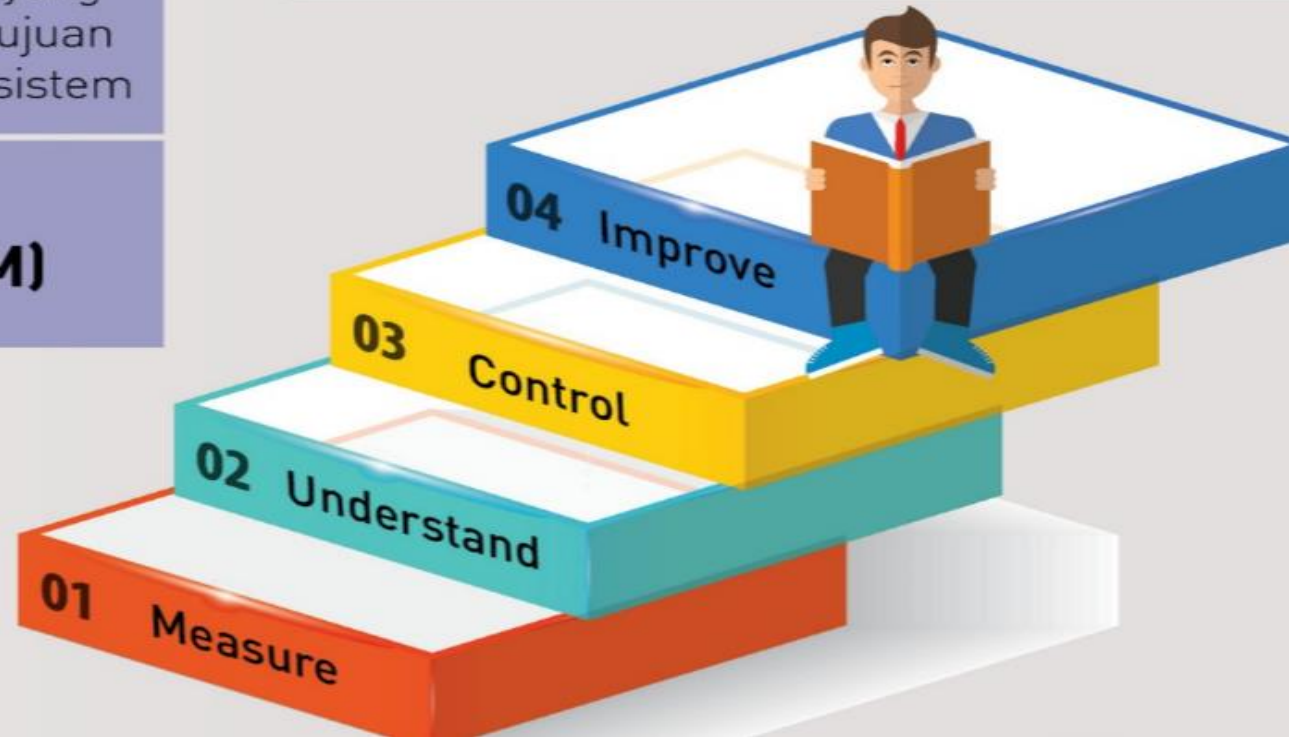
Tata Laksana & Manajemen UKPBJ belum terstandarisasi



## Teori Kematangan Organisasi

<b>DEFINISI</b>	Gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi
<b>TUJUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sebagai peta jalan atau kerangka kerja yang menjadi acuan untuk mencapai suatu tujuan</li><li>• Sebagai suatu ukuran pengembangan sistem</li></ul>
<b>METODE</b>	Menggunakan <b>Capability Maturity Model (CMM)</b>

Dikutip dari Henry Mintzberg, *"Structure in Fives: Designing Effective Organization"*, 1983, Hal 170.  
*If you can't measure it, you can't understand it*  
*If you can't understand it, you can't control it*  
*If you can't control it, you can't improve it*



## CIRI-CIRI MODEL KEMATANGAN

1

Proses pengembangan suatu organisasi disederhanakan dalam wujud  
**Tingkatan Kematangan**

2

Tingkatan kematangan tersebut dicirikan dengan beberapa  
**Persyaratan Tertentu**  
yang harus diraih

**Teori Capability Maturity Model (CMM)** menggambarkan sebuah proses transformasi organisasi secara berurutan (gradual) dari penerapan atas sebuah disiplin yang awalnya belum matang sampai kepada aplikasi yang lebih optimal dalam organisasi.

3

Tingkatan yang ada  
**Disusun Sekuensial**  
mulai dari tingkat inisial sampai pada tingkat terakhir (paling sempurna)

4

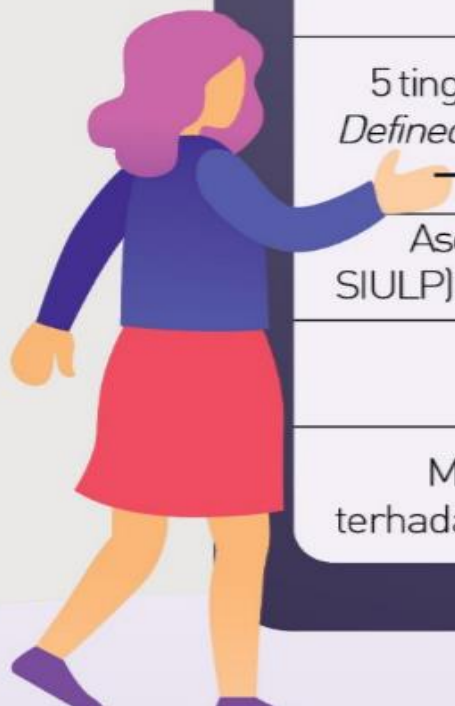
Sang entitas bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan lain secara  
**Bertahap/Berurutan**  
selama pengembangan

5

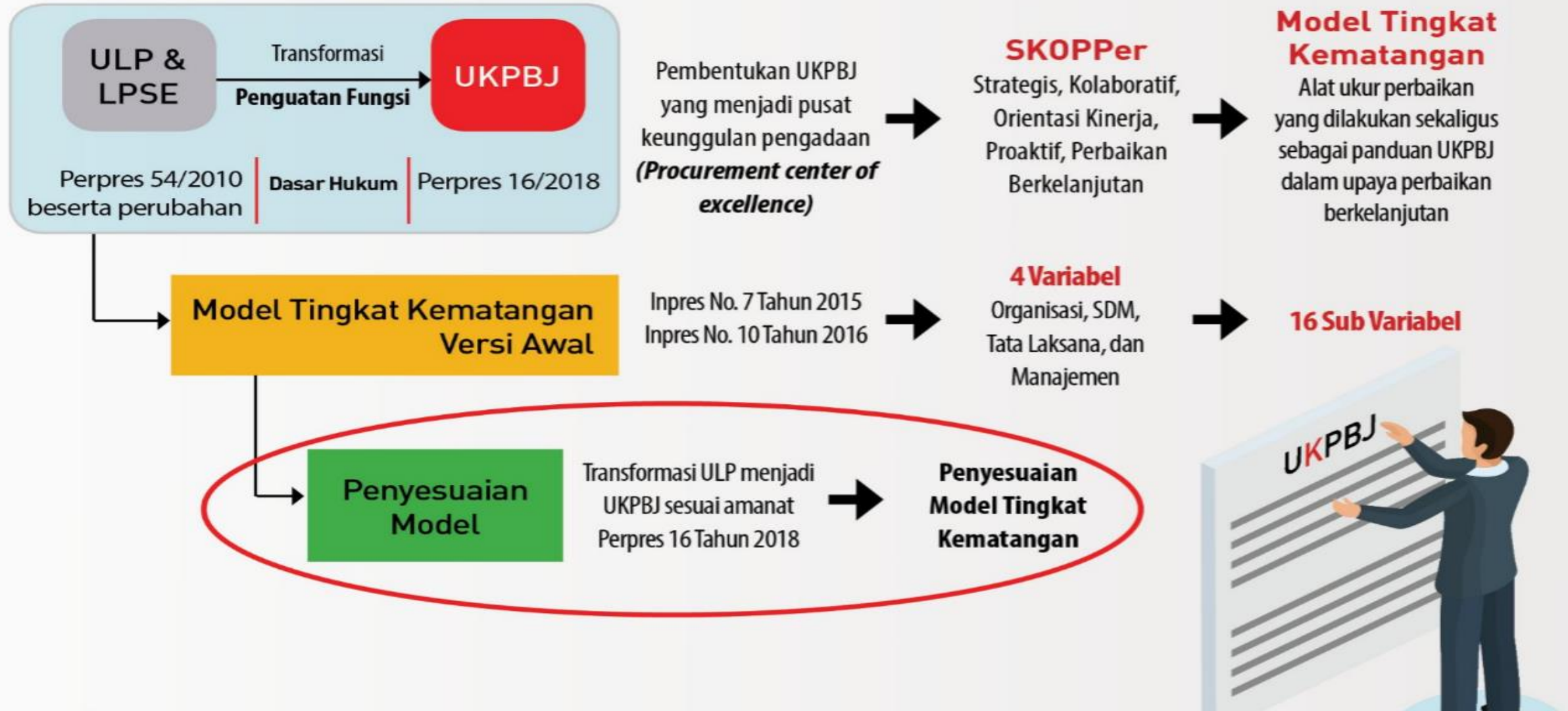
Tingkatan yang lebih tinggi berarti telah  
**Memenuhi Semua Syarat**  
deskripsi/bukti dukung pada level tersebut dan level dibawahnya

## CATATAN MODEL TINGKAT KEMATANGAN SEBELUMNYA

MODEL TINGKAT KEMATANGAN ULP (LKPP)		INDONESIA PROCUREMENT MATURITY MODEL (MCA-I)
Fokus ke ULP	<b>Target Pengukuran</b>	Fungsi PBJ dalam sebuah organisasi
4 variabel, 16 sub variabel	<b>Struktur</b>	4 domain, 11 indikator, 53 sub indikator
5 tingkatan ( <i>Initial, Repeatable, Defined, Managed, &amp; Optimized</i> ) → <i>Compliance Based</i>	<b>Tingkat Pengukuran</b>	5 tingkatan ( <i>Reactive, Compliant, Proactive, Strategic, &amp; Innovative</i> ) → <i>Behavior Based</i>
Asesmen secara online (via SIULP) dan verifikasi oleh LKPP	<b>Implementasi</b>	Asesmen secara manual (via mentor) dan online (via SICOE)
Alat bantu RANPPK	<b>Penekanan</b>	Alat bantu perbaikan fungsi pengadaan di organisasi
Memastikan <i>compliance</i> terhadap kriteria kematangan	<b>Fitur</b>	Membantu organisasi melakukan perbaikan berkelanjutan di fungsi pengadaan



# PEMAHAMAN KEBUTUHAN PENYESUAIAN MODEL TINGKAT KEMATANGAN



## STRUKTUR TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

Tinggi	Unggul	Penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya
	Strategis	Proses/Pola pikir pengelolaan inovatif yang terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi
	Proaktif	Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal
	Esensi	Memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, namun masih tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif
Rendah	Inisiasi	Pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih adhoc dan belum merefleksikan kebutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ)

### Dasar Usulan

- *Behaviour Approach*
- Memastikan konsistensi penjabaran ke setiap variabel
- Menjadi alat bantu bagi K/L/PD untuk melakukan perbaikan

# Mengukur Kematangan Melalui *Behavior* Organisasi



## MODEL TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ  
Terdiri atas : **4** domain dan **9** variabel



Manajemen Pengadaan	Pengorganisasian	Perencanaan	Sistem Informasi
Manajemen Penyedia	Tugas/Fungsi	Pengembangan	
Manajemen Kinerja			
Manajemen Resiko			

Setiap variabel memiliki 5 tingkat kematangan, yang terdiri dari : **Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis, dan Unggul.**

**Target :**  
UKPBJ mencapai tingkat kematangan level 3 yaitu **PROAKTIF**

# MODEL TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

## Variabel Manajemen Pengadaan

Uraian	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul	
<b>Deskripsi</b>	Pengelolaan proses pemilihan berbasis dokumen pemilihan	Pengelolaan proses pemilihan berbasis SOP Pemilihan	Pengelolaan proses PBJ terintegrasi diseluruh mata rantai proses pengadaan dengan berkolaborasi dengan pihak terkait	Pengelolaan proses PBJ yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran organisasi melalui penerapan strategi dan metode yang sesuai	Pengelolaan proses PBJ dengan memunculkan berbagai inovasi untuk perbaikan kinerja yang merefleksikan ciri organisasi pembelajar	
<b>Key Drivers</b>	Fokus UKPBJ dalam pengelolaan mata rantai PBJ	Penyelesaian proses pemilihan berbasis dokumen pemilihan	Memastikan kepatuhan atas prosedur di tahap persiapan dan eksekusi pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak</li> <li>Memastikan keamanan &amp; keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik</li> </ul>	Penerapan strategi dan metode pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja organisasi	Memunculkan inovasi proses pemilihan yang sudah terbukti dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta dapat menjadi contoh UKPBJ lain
	Ketersediaan prosedur yang mendukung peran UKPBJ	Tidak ada SOP	SOP <sup>1</sup> di tahap persiapan dan pemilihan	SOP terintegrasi di tahap perencanaan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak	SOP untuk penerapan pengadaan strategis	SOP atau sistem yang mendukung pengelolaan pengetahuan PBJ sebagai organisasi pembelajar
<b>Bukti Dukung</b>	Dokumen/ laporan proses pemilihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Persiapan Pengadaan</li> <li>SOP Pemilihan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengadaan terintegrasi meliputi SOP Perencanaan, SOP Persiapan Pengadaan, SOP Pemilihan, SOP Pelaksanaan kontrak</li> <li>Dokumen pemenuhan standar LPSE : Standar 5: Pengelolaan Layanan Helpdesk; Standar 9: Pengelolaan Keamanan Perangkat; Standar 10: Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan; Standar 11 : Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan; Standar 17 : Penilaian Internal</li> <li>Berita acara/notulensi rapat dengan pelaku pengadaan dan atau pelaku usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengadaan Strategis</li> <li>Penerapan pengadaan strategis, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrak payung</li> <li>Pengelolaan katalog</li> <li>Strategi konsolidasi</li> </ul> </li> <li>Evaluasi berdasarkan pengadaan berkelanjutan</li> <li>Instruksi pimpinan atas penerapan rekomendasi UKPBJ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Manajemen Pengetahuan</li> <li>Liputan kegiatan <i>sharing session</i> ke K/L/PD lain atas inovasi yang diterapkan</li> <li>Laporan kegiatan benchmark</li> </ol>	

<sup>1</sup> Penyusunan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

# MODEL TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

## Variabel Manajemen Penyedia

Uraian	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
<b>Deskripsi</b>	Sebatas melakukan pembuktian kualifikasi penyedia dan pemanfaatan daftar hitam LKPP	Pengelolaan registrasi penyedia dan pembuktian kualifikasi penyedia	Pengelolaan penyedia dalam proses registrasi dan kualifikasi serta pemanfaatan ketersediaan penyedia untuk memastikan keberhasilan proses pemilihan	Pengelolaan penyedia berdasarkan klasifikasi kinerja untuk memastikan pembinaan yang efektif selaras dengan program kerja organisasi	Pengelolaan penyedia yang mendukung pengadaan strategis serta pola kemitraan <sup>2</sup> jangka panjang
<b>Key Drivers</b>	Interaksi dengan penyedia	Sebatas pada saat pembuktian kualifikasi pemilihan	Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	Tersedianya program pembinaan penyedia berdasarkan analisis kebutuhan organisasi dan data kinerja penyedia untuk pencapaian program kerja organisasi	Penerapan pola kemitraan dalam rangka membangun kolaborasi untuk menjamin kepentingan strategis jangka panjang organisasi
	Analisis data kinerja penyedia	Sebatas informasi dari PPK atau dari daftar hitam nasional LKPP	Melakukan evaluasi kinerja peserta dari dokumen penawaran yang disampaikan dalam proses pemilihan	Melakukan analisis dan kategorisasi <sup>4</sup> kinerja untuk memastikan ketersediaan penyedia bagi pelaksanaan program kerja organisasi	Metode serta hasil analisis menjadi rujukan UKPBJ lain
	<b>Bukti Dukung</b>	1. Penggunaan daftar hitam di Inaproc 2. Kertas Kerja Evaluasi	1. Kertas Kerja Evaluasi 2. Laporan registrasi dan verifikasi 3. Aanwijzing	1. SOP Pengelolan Penyedia 2. Laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut 3. Hasil notulensi rapat progress pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia	1. Laporan implementasi sistem pengelolaan penyedia <sup>3</sup> dalam melakukan analisis ketersediaan, analisis kinerja dan pemetaan penyedia 2. Berita acara/notulensi rapat Vendor Briefing <sup>5</sup> /De-briefing <sup>6</sup>

<sup>2</sup> Kemitraan yang dimaksud dapat berbentuk kontrak payung, katalog ataupun KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha)

<sup>3</sup> Sistem pengelolaan penyedia (Vendor Management System) dapat berupa aplikasi yang dikembangkan secara khusus atau penggunaan sistem sederhana (contoh. Excel)

<sup>4</sup> Kategorisasi adalah pengelompokan kategori kinerja penyedia berdasarkan pengukuran dari aspek Biaya, Mutu, Waktu dan Tingkat Layanan

<sup>5</sup> Vendor Briefing adalah kegiatan sosialisasi program kerja sekaligus market survey untuk mengetahui kualifikasi/kemampuan penyedia yang tersedia di pasar

<sup>6</sup> Vendor De-briefing adalah mekanisme penjelasan ke pihak penyedia atas hasil evaluasi untuk paket-paket khusus

# MODEL TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

## Variabel Manajemen Kinerja

Uraian	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul	
<b>Deskripsi</b>	Belum menerapkan manajemen kinerja	Penerapan pengelolaan kinerja melalui pelaporan efisiensi pengadaan (harga kontrak - hps) dan jumlah penyelesaian paket pemilihan	Sudah ada sistem pengelolaan kinerja yang mencakup perencanaan dan pengendalian kinerja	Sudah ada sistem pengelolaan kinerja yang memastikan adanya keselarasan antara kinerja PBJ dengan kinerja organisasi, dimana laporan kinerja PBJ telah menjadi referensi dalam proses pengambilan keputusan pimpinan.	Laporan pengendalian kinerja pengadaan sudah digunakan sebagai rujukan dalam upaya perbaikan kapabilitas organisasi K/L/PD	
<b>Key Drivers</b>	Cakupan penerapan manajemen kinerja	Terbatas pada aktifitas pencatatan pencapaian atas indikator yang umum digunakan, seperti indikator efisiensi dan penyelesaian paket	Terbatas pada aktifitas pencatatan pencapaian atas indikator yang umum digunakan (efisiensi, penyelesaian paket) atau mandat di internal organisasi (penyerapan anggaran, progress percepatan tender)	Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi <sup>7</sup> proses pengadaan	Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan penggunaan indikator di 4 area <i>outcome</i> (biaya, mutu, waktu dan tingkat layanan) yang selaras dengan obyektif organisasi	Pengembangan indikator baru yang menjadi acuan dalam mengukur capaian kinerja organisasi
	Pemanfaatan Hasil	Hanya mendokumentasikan hasil pencapaian	Menjadi pembelajaran untuk perbaikan pelaksanaan proses pemilihan berikutnya	Menjadi dasar proses pengambilan keputusan strategis baik yang bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang	Menjadi rujukan arah pengembangan kapabilitas organisasi ke depan	
<b>Bukti Dukung</b>	Laporan pelaksanaan kegiatan pemilihan	Laporan penyelesaian paket pemilihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ</li> <li>2. Dokumen perencanaan kinerja UKPBJ</li> <li>3. Laporan pencapaian indikator kinerja utama UKPBJ</li> <li>4. Dokumen standar 15 LPSE : Pengelolaan Hubungan</li> </ol>	Laporan pencapaian kinerja pengadaan untuk pengendalian program kerja organisasi	Rekomendasi pengembangan kapabilitas fungsi pengadaan tercantum dalam dokumen perencanaan K/L/PD	

<sup>7</sup> Efisiensi: pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara yang benar sehingga dapat memberikan output sesuai dengan harapan pelanggan

Kata RESIKO diganti dengan RISIKO  
(sesuai EYD KBBI)

## L TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

### Variabel Manajemen Resiko

Uraian	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul	
<b>Deskripsi</b>	Belum ada pengelolaan risiko pengadaan	Pengelolaan risiko sudah dimulai khususnya untuk identifikasi dan mitigasi risiko penyelesaian paket pemilihan	Sudah diterapkan SOP perencanaan dan mitigasi risiko pengadaan serta pelaporan untuk mendukung tercapai target kegiatan pengadaan	Sudah diterapkan SOP pengendalian risiko pengadaan, khususnya untuk pengadaan strategis yang mendukung target kinerja organisasi	Hasil dari pengendalian risiko pengadaan sudah digunakan sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan baru ataupun perbaikan/ penyempurnaan kebijakan	
<b>Key Drivers</b>	Cakupan penerapan manajemen risiko	Penerapan manajemen risiko terbatas di proses pemilihan berdasarkan inisiatif individu dan bersifat reaktif	Telah dilakukan identifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah diterapkannya kode etik untuk para pengelola UKPBJ</li> <li>Siklus manajemen risiko<sup>8</sup> diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak</li> </ul>	Manajemen risiko diterapkan untuk pelaksanaan seluruh paket strategis organisasi dengan menekankan pada upaya pengendalian risiko	Menjadi rujukan UKPBJ lain, dari sisi metode pengelolaan serta pustaka risiko <sup>9</sup> yang dimiliki
	Pemanfaatan hasil	Pembelajaran individu dalam pengelolaan risiko paket	Pembelajaran pokja dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam proses pemilihan	Pendokumentasian dan pelaporan atas proses yang dilaksanakan dalam pengelolaan risiko	Penyusunan profil risiko paket strategis dan rekomendasi penanganan	Penerapan kebijakan baru untuk meningkatkan pengendalian organisasi atas risiko PBJ
<b>Bukti Dukung</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko proses pemilihan</li> <li>Laporan penyelesaian kasus dalam pelaksanaan paket (jika ada)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Manajemen Risiko (mengakomodir berbagai jenis risiko, seperti risiko hukum, gagal tender, keterlambatan penyelesaian kontrak)</li> <li>Dokumen Standar 4 LPSE : Pengelolaan Risiko Layanan</li> <li>Dokumen mitigasi risiko pengadaan</li> <li>Dokumen kode etik pengelola UKPBJ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen profil risiko paket pengadaan strategis</li> <li>Laporan pengendalian risiko</li> <li>Rekomendasi berdasarkan kajian risiko, seperti penandatanganan MoU dengan APH</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan dari pembelajaran pengelolaan risiko</li> <li>Pembaharuan pustaka risiko</li> </ol>	

<sup>8</sup> Siklus Manajemen Risiko : Implementasi kerangka dalam pengelolaan risiko meliputi perencanaan implementasi (tahap identifikasi, analisis, *response plan*, monitor & control), pemantauan, dan review framework serta perbaikan berkelanjutan

<sup>9</sup> Pustaka Risiko: Dokumentasi atas daftar risiko/isu yang berhasil diidentifikasi beserta penanganan yang dilakukan sebagai catatan untuk pengelolaan selanjutnya

# MODEL TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

## Variabel Pengorganisasian Kelembagaan

Uraian	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
<b>Deskripsi</b>	Unit kerja Adhoc yang hanya fokus menjalankan aktifitas pemilihan	UKPBJ struktural dan fokus untuk penyelesaian paket pemilihan	UKPBJ struktural yang bertanggung jawab dalam fungsi pengadaan barang/jasa	UKPBJ dengan struktur yang memungkinkan peran strategis untuk turut mensukseskan Program Kerja K/L/PD	UKPBJ yang berperan Strategis dan memiliki kelincahan (Agility) mengikuti dinamika K/L/PD
<b>Key Drivers</b>	Kemampuan dalam mendukung visi dan strategi organisasi	Organisasi yang memfokuskan pada pelaksanaan aktifitas pemilihan	Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan	Organisasi UKPBJ yang dirancang untuk menjawab tantangan program dalam pencapaian tujuan organisasi	UKPBJ menjadi organisasi pembelajar yang efektif dan fleksibel / <i>agile</i> terhadap kebutuhan jangka menengah/ panjang organisasi
	Posisi organisasi UKPBJ	Organisasi UKPBJ masih adhoc atau bagian dari unit kerja lain	Organisasi UKPBJ merupakan unit kerja struktural untuk fungsi pemilihan	Organisasi UKPBJ merupakan unit kerja struktural untuk fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta fungsi pembinaan dan advokasi PBJ	Organisasi UKPBJ yang memungkinkan kemudahan koordinasi dengan pimpinan dan semua satker
<b>Bukti Dukung</b>	SK Panitia Pengadaan	Permen/Perka/ Perkada terkait SOTK yang mengatur fungsi pemilihan saja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Permen/Perka/Perkada terkait SOTK UKPBJ yang meliputi fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE dan pembinaan/ advokasi PBJ</li> <li>Dokumen pemenuhan standar LPSE, <ul style="list-style-type: none"> <li>Standar 1 : Kebijakan Layanan;</li> <li>Standar 2 : Pengorganisasian Layanan;</li> <li>Standar 13 : Pengelolaan Anggaran Layanan</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ada peraturan/ keputusan pimpinan yang memungkinkan peran UKPBJ yang lebih strategis dan kemampuan berkolaborasi dengan stakeholders</li> <li>Bukti partisipasi dalam rapat pimpinan strategis</li> </ol>	Kajian kelembagaan UKPBJ yang selaras dengan dokumen Renstra Organisasi

# MODEL TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

## Variabel Tugas/Fungsi Kelembagaan

Uraian		Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
<b>Deskripsi</b>		Menjalankan aktifitas pemilihan	Mengelola kegiatan pemilihan	Mengelola fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta fungsi pembinaan dan advokasi PBJ untuk memastikan kebutuhan barang/jasa dapat terpenuhi dengan baik	Mengelola fungsi PBJ melalui sinergi dengan stakeholder terkait sehingga mampu memberikan kontribusi pada pencapaian target K/L/PD	Mengelola fungsi PBJ di K/L/PD dan terlibat aktif dalam pengembangan kapabilitas K/L/PD serta PBJ Nasional
<b>Key Drivers</b>	Cakupan layanan yang diberikan, baik ke pihak internal ataupun eksternal	Sebatas pelayanan dalam aktifitas pemilihan	Proses pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan perencanaan pengadaan</li> <li>• Proses pemilihan</li> <li>• <b>Pendampingan Pelaksanaan Kontrak</b></li> <li>• Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ</li> <li>• Pembinaan SDM PBJ</li> <li>• Layanan pengadaan secara elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan perencanaan kebutuhan serta strategi pengadaan</li> <li>• Penyediaan informasi dan rekomendasi dalam rapat MONEV regular pimpinan</li> </ul>	Keterlibatan dalam pengadaan secara nasional
	Sinergi antar fungsi untuk menciptakan value bagi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terbangun sinergi efektif di antara pemangku kepentingan.</li> <li>• Para pihak hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada</li> </ul>	Sinergi UKPBJ dengan PPK dan PPHP sudah terjalin efektif untuk mensukseskan paket pengadaan yang ditetapkan dalam SIRUP	Sinergi UKPBJ dengan para pihak (PPK, PA/KPA, Pengguna, Biro Perencanaan, dll) telah berjalan efektif untuk mensukseskan program kerja	Sinergi UKPBJ dengan LKPP dan pemangku kepentingan lain telah terbangun untuk membangun PBJ yang lebih baik di INDONESIA	
<b>Bukti Dukung</b>		SK Pokja Pemilihan	<b>Dokumen Regulasi yang berisi Tugas dan Fungsi Pemilihan Penyedia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tusi UKPBJ sesuai dengan amanat Perpres 16 Tahun 2018 serta aturan turunannya</li> <li>2. Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui <i>Stakeholder Analysis</i><sup>10</sup> PBJ dan <i>Engagement Plan</i><sup>11</sup> dengan pihak internal (PPK, PPHP, APIP) serta eskternal (penyedia, APH)</li> <li>3. Laporan koordinasi UKPBJ dengan pihak terkait dalam pelaksanaan paket</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui <i>Stakeholder Analysis</i> PBJ dan <i>Engagement Plan</i> dengan Satker/OPD Pengguna, Penyedia, APH dan Pimpinan K/L/PD</li> <li>2. Lap. Monev Pengadaan untuk rapat pimpinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil kajian/riset kelembagaan PBJ yang dimanfaatkan untuk program Nasional</li> <li>2. Laporan keterlibatan UKPBJ mendukung program pengembangan kelembagaan pengadaan secara Nasional</li> </ol>

<sup>10</sup> *Stakeholder analysis* adalah analisis tingkat kepentingan dan pengaruh dari pemangku kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa untuk menentukan strategi pengelolaan hubungan yang tepat

<sup>11</sup> *Engagement plan* adalah rencana aksi yang disusun untuk mengelola serta meningkatkan kualitas hubungan dengan setiap pemangku kepentingan sesuai strategi yang telah ditetapkan

## DEL TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

### Variabel Perencanaan SDM

Uraian	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
<b>Deskripsi</b>	Belum ada perencanaan SDM UKPBJ	Perencanaan SDM berupa Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk menempatkan SDM Pokja Pemilihan Penuh Waktu	Perencanaan SDM berupa Anjab dan ABK untuk personil di UKPBJ yang mengakomodir perluasan peran serta pemenuhan Jabfung PPBJ	Perencanaan seluruh SDM Pengadaan melalui Anjab dan ABK yang berbasis standar kompetensi dan sudah menjadi bagian dari Renstra SDM K/L/PD	Perencanaan serta Rekrutment SDM Pengadaan senantiasa diselaraskan dengan kebutuhan dan standar kompetensi terkini
<b>Key Drivers</b>	Analisa Kebutuhan & SDM Pengadaan	Belum ada analisis kebutuhan Pokja pemilihan dan SDM UKPBJ lainnya	Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu	Sudah dilakukan Anjab dan ABK SDM Pengadaan yang terintegrasi dengan Renstra SDM dari K/L/PD	Selalu ada perbaikan berkelanjutan dalam aktifitas Anjab dan ABK dan menselaraskan dengan kebutuhan fungsi PBJ dan standar kompetensi terkini
	Rekrutmen SDM Pengadaan	Penempatan SDM Pengadaan paruh waktu	Penempatan SDM penuh waktu sudah dilakukan untuk Pokja Pemilihan	Sudah ada penempatan Jabfung PPJB di Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	Sudah ada penempatan seluruh SDM Pengadaan sesuai dengan Anjab dan ABK
<b>Bukti Dukung</b>	Surat Penunjukan Pokja pemilihan paruh waktu ( <i>part-time</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Anjab &amp; ABK untuk Personel/ Pelaksana yang Melaksanakan Pemilihan</li> <li>Surat Keputusan pengangkatan/ penempatan SDM Pokja Pemilihan di UKPBJ (penuh waktu)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Anjab dan ABK untuk personil UKPBJ</li> <li>Surat Keputusan pengangkatan/ penempatan personil di UKPBJ</li> <li>Surat pengangkatan Jabfung PPBJ di UKPBJ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Anjab dan ABK SDM Pengadaan sesuai dengan rencana pengembangan SDM K/L/PD</li> <li>Surat pengangkatan Jabfung PPBJ, PPK, PPHP, KPA sesuai Anjab dan ABK</li> </ol>	Rekomendasi pengembangan kapabilitas fungsi pengadaan tercantum dalam dokumen perencanaan K/L/PD

# MODEL TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

## Variabel Pengembangan SDM

Uraian	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul	
<b>Deskripsi</b>	Pengembangan SDM diberikan kepada Pokja Pemilihan untuk bisa menjalankan fungsi pemilihan dalam PBJ	Pengembangan SDM yang mempertimbangkan peningkatan kapasitas secara terbatas untuk Pokja Pemilihan	Pengembangan SDM berbasis kompetensi dengan metoda pelatihan dan mentoring <sup>12</sup> serta diselaraskan dengan kinerja personil UKPBJ	Pengembangan SDM berbasis kompetensi yang komprehensif untuk pemangku kepentingan PBJP	Pengembangan SDM yang mendukung UKPBJ sebagai organisasi pembelajar serta pengendalian kinerja SDM pengadaan	
<b>Key Drivers</b>	Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	Pelatihan dan sertifikasi PBJ tingkat dasar	Keikutsertaan dalam program peningkatan kapasitas melalui kegiatan bimtek/sosialisasi/rapat koordinasi terkait PBJP	Program pelatihan & mentoring Kompetensi Pengadaan berbasis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Kompetensi Jabatan PBJP</li> <li>• Kompetensi personil UKPBJ</li> <li>• Kompetensi pengelolaan kelembagaan<sup>13</sup> UKPBJ</li> </ul>	Program pengembangan kompetensi para pemangku kepentingan PBJP	Pengkinian program pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan PBJP
	Pengelolaan Kinerja SDM Pengadaan	Belum ada perencanaan dan penilaian kinerja SDM Pengadaan	Perencanaan kinerja sudah dilakukan secara terbatas di lingkungan Pokja Pemilihan	Perencanaan dan pemantauan kinerja SDM sudah dilakukan untuk personel UKPBJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan pengendalian kinerja SDM sudah dilakukan untuk personel UKPBJ</li> <li>• Telah diterapkan insentif berbasis kinerja</li> </ul>	Pengendalian kinerja SDM Pengadaan sudah dilakukan mengacu pada program kerja K/L/PD
<b>Bukti Dukung</b>	Sertifikasi PBJ Dasar untuk Pokja Pemiliha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan dan Sertifikasi PBJ Dasar untuk Pokja Pemilihan</li> <li>2. Sertifikat keikutsertaan (bimtek/ sosialisasi/ rapat koordinasi) atau rekapitulasi keikutsertaan dalam program peningkatan kapasitas</li> <li>3. Perencanaan kinerja Pokja Pemilihan<sup>14</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personil UKPBJ</li> <li>2. Laporan Pelatihan dan Mentoring berbasis kompetensi bagi personel UKPBJ</li> <li>3. Laporan Evaluasi Kinerja Staf UKPBJ &amp; Jabfung PPJB</li> <li>4. Standar 8 LPSE: Pengelolaan SDM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi pemangku kepentingan PBJP</li> <li>2. Laporan Pengembangan Kompetensi pemangku kepentingan PBJP</li> <li>3. Dokumen perencanaan dan pengendalian kinerja personel UKPBJ</li> <li>4. Peraturan tentang penetapan insentif berbasis kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan program pembelajaran<sup>15</sup></li> <li>2. Laporan pengendalian kinerja SDM pengadaan</li> </ol>	

<sup>12</sup> Mentoring adalah salah satu metoda dalam pengembangan kompetensi dengan menugaskan seorang mentor (pihak yang kompeten/berpengalaman) untuk menjadi pembimbing mentee (anak didik) dalam mengembangkan kompetensi di area tertentu. Mentoring juga dapat dikombinasikan sebagai tindak lanjut atas kegiatan pelatihan yang diterima sebelumnya oleh setiap mentee, untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan pelatihan benar-benar dipraktekkan oleh para mentee.

<sup>13</sup> Kompetensi pengelolaan kelembagaan UKPBJ mengacu ke 12 modul manajerial versi MCA-I

<sup>14</sup> Perencanaan kinerja dapat berupa SKP

<sup>15</sup> Antara lain: sistingering, mentoring, keikutsertaan dalam tim pengembangan kompetensi

# MODEL TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

## Variabel Sistem Informasi

Uraian	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
<b>Deskripsi</b>	Belum memiliki tata kelola sistem informasi	Pengelolaan penggunaan sistem aplikasi pengadaan	Pengelolaan sistem informasi pengadaan sudah sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi	Pengelolaan sistem informasi pengadaan yang mendukung penerapan strategi pengadaan khusus dan terintegrasi dengan sistem lainnya <sup>16</sup> serta sudah dimanfaatkan untuk pengendalian kinerja organisasi.	Pengelolaan sistem informasi sudah dimanfaatkan untuk analisis yang lebih komprehensif dan sudah memberikan layanan informasi kepada pihak lain.
<b>Key Drivers</b>	Cakupan sistem informasi dalam pengadaan barang/ jasa	Mencakup seluruh sistem yang disediakan oleh LKPP (SIRUP, eTendering, e-Purchasing, SIKAP)	Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak	Dukungan layanan seperti <i>e-marketplace</i> <sup>17</sup> , <i>Vendor Performance Management System</i> <sup>18</sup> (VPMS) termasuk dalam rangka penerapan strategi pengadaan khusus	Pengembangan kemampuan data analytic untuk analisis kinerja dan perkiraan kebutuhan organisasi
	Ketersediaan data dan informasi pengadaan bagi stakeholder	Penyediaan data secara manual	Penyajian data dan informasi standar yang disediakan oleh sistem	Pengelolaan data dan informasi terintegrasi untuk pelaporan, analisis dan pengendalian kinerja organisasi	Sistem serta pengelolaan data dan informasi dijadikan referensi utama bagi fungsi organisasi lainnya
<b>Bukti Dukung</b>		SOP pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem aplikasi pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan penggunaan Sistem Informasi Pengadaan secara penuh</li> <li>Pemenuhan standar LPSE: <ul style="list-style-type: none"> <li>Standar 3: Pengelolaan Aset Layanan</li> <li>Standar 6: Pengelolaan Perubahan</li> <li>Standar 7: Pengelolaan Kapasitas</li> <li>Standar 12: Pengelolaan Kelangsungan Layanan</li> <li>Standar 14: Pengelolaan Dukungan Layanan</li> <li>Standar 16: Pengelolaan Kepatuhan</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen arsitektur/sistem informasi pengadaan terintegrasi, termasuk petunjuk penggunaan seluruh sistem</li> <li>Laporan pengendalian kinerja pengadaan sudah diperoleh dari pengolahan database aplikasi pengadaan.</li> </ol>	Laporan analitik informasi pengadaan digunakan untuk perbaikan sistem maupun perbaikan kebijakan pengadaan

<sup>16</sup> Sistem lain: SPAN, SAKTI, SIMAK BMN, SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIPKD, dll

<sup>17</sup> E-marketplace: pengembangan jenis katalog (nasional, sektoral atau lokal), toko daring ataupun pemilihan penyedia yang di develop oleh UKPBJ

<sup>18</sup> VPMS adalah sistem yang memfasilitasi pengelolaan dan pemeringkatan kinerja penyedia

## MEKANISME PERHITUNGAN SKOR

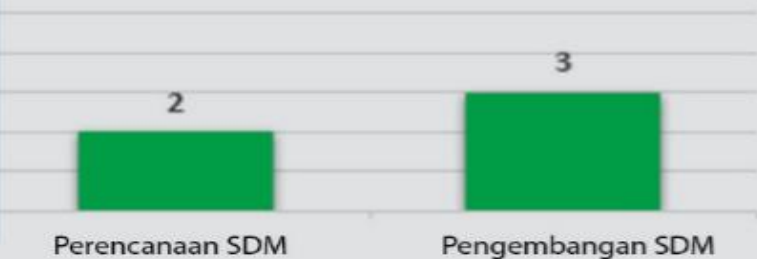
Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria CoE	Tingkat Kematangan Saat Ini	Pencapaian Kriteria CoE
<b>Proses</b>	<b>1</b> Manajemen Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus UKPBJ dalam pengelolaan mata rantai PBJ</li> <li>Ketersediaan prosedur yang mendukung peran UKPBJ</li> </ul>	3	3	<b>4 dari 9</b>
	1.2 Manajemen Penyedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisa data kinerja penyedia</li> <li>Interaksi dan pembinaan ke penyedia</li> </ul>	3	2	
	1.3 Manajemen Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan penerapan manajemen kinerja</li> <li>Pemanfaatan hasil manajemen kinerja bagi kepentingan organisasi</li> </ul>	3	2	
	1.4 Manajemen Resiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan penerapan manajemen resiko dalam mata rantai proses PBJ</li> <li>Pemanfaatan hasil yang diperoleh organisasi dan penerapan manajemen resiko</li> </ul>	3	2	
<b>Kelembagaan</b>	<b>2</b> Pengorganisasian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan dalam mendukung visi dan strategi organisasi</li> <li>Posisi organisasi UKPBJ</li> </ul>	3	3	
	<b>3</b> Tugas dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan layanan yang diberikan baik ke pihak internal ataupun eksternal</li> <li>Sinergi antar fungsi di internal yang dapat menciptakan value bagi organisasi</li> </ul>	3	3	
<b>SDM</b>	3.1 Perencanaan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis kebutuhan serta pemenuhan kebutuhan SDM</li> <li>Rekrutmen SDM Pengadaan</li> </ul>	3	2	
	<b>4</b> Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kompetensi SDM PBJ</li> <li>Pembinaan stakeholder PBJ untuk mendukung pencapaian kinerja pengadaan</li> </ul>	3	3	
<b>Sistem Informasi</b>	4.1 Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan otomasi proses pengadaan barang/jasa</li> <li>Ketersediaan data dan informasi pengadaan bagi stakeholder</li> </ul>	3	2	

# DASHBOARD KEMATANGAN UKPBJ

## Tingkat Kematangan Domain - Proses



## Tingkat Kematangan Domain - Proses

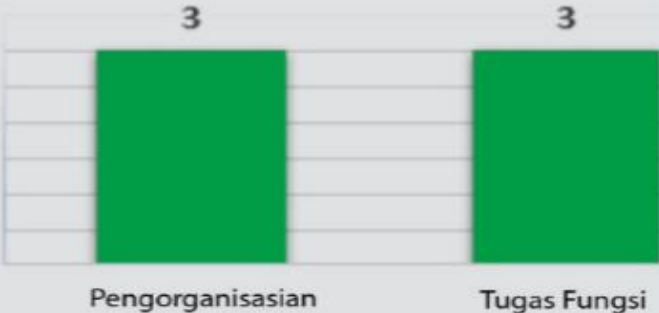


## Pencapaian Kriteria CoE (All)

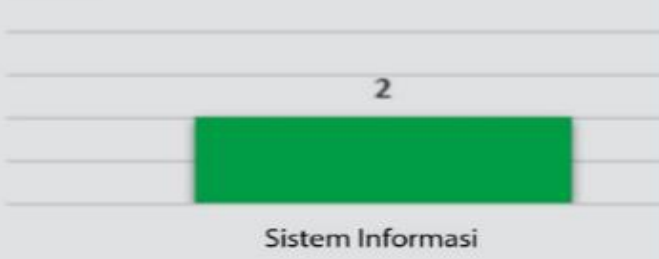


■ Capaian Kriteria CoE ■ Gap Pencapaian

## Tingkat Kematangan Domain - Kelembagaan



## Tingkat Kematangan Domain - Sistem Informasi



# SISTEM INFORMASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (SIUKPBJ)



# PANDUAN PENGISIAN TINGKAT KEMATANGAN MELALUI APLIKASI SIUKPBJ

BERITA | UNDUH | GALERI | ID | EN

MASUK | PENDAFTARAN

**UKPBJ** | **LKPP**  
Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Beranda | Dasbor | Peta | Kematangan | Layanan | Pusat Informasi | Kontak



**RAKORNAS  
UKPBJ PROVINSI  
2019** Percepatan Pembentukan  
UKPBJ Provinsi sebagai  
Pusat Keunggulan Pengadaan

Nusa Tenggara Timur  
7-8 Februari 2019

Kiki (021-29935577 / 144) | Tonny (0811-177700) | dit.bangprof@lkpp.go.id

## Model Kematangan UKPBJ

Terdiri dari 4 Domain dan 9 Variabel

# PENDAFTARAN

MASUK PENDAFTARAN

Beranda Dasbor Peta Kematangan Layanan Pusat Informasi Kontak

Pendaftaran Admin SIUKPBJ

Mohon masukan data valid sesuai dengan isian

Nomor Surat Penetapan Penunjukan Admin	<input type="text" value="Masukan Nomor Surat Penetapan Penunjukan Admin"/>
Nama Admin UKPBJ	<input type="text" value="Masukan Nama Admin UKPBJ"/>
NIP Admin UKPBJ	<input type="text" value="Masukan NIP Admin ULP"/>
Jabatan dalam Unit Kerja PBJ (UKPBJ)	<input type="text" value="-- Pilih Jabatan dalam UKPBJ --"/>
Pilih K/L/Pemda/I	<input type="radio"/> Provinsi <input type="radio"/> Kabupaten/Kota <input checked="" type="radio"/> K/L
	<input type="text" value="-- * Pilih K/L/I --"/>
No. Telepon :	<input type="text"/> - <input type="text"/> ext <input type="text"/> <input type="button" value="+"/>

Masukan Email Valid Anda

Masukan Password Unik untuk Login

Ketik Ulang Password Sebelumnya

Upload File SK Penunjukkan

\*Ketik Karakter dari Gambar di samping

Alamat Email

\* Wajib diisi dan digunakan untuk masuk ke sistem, dan untuk pengiriman notifikasi.

\* Masukan Password..

\* Konfirmasi Password..

\* Pilih Scan File SK Penunjukan (JPG,PNG...)

4SIP

ketik ulang

Register Account

1. Klik menu "Pendaftaran"
2. Isi seluruh data pendaftaran
3. Unggah SK/ST Admin SIUKPBJ
4. Klik "Register" untuk mengirim data pendaftaran

### \*Note :

- Dokumen yg diunggah hanya format PDF/JPG
- Data pendaftaran akan diverifikasi oleh admin aplikasi LKPP dan pengguna akan menerima email notifikasi data verifikasi pendaftaran

# LOGIN

The screenshot shows the website interface for UKPBJ LKPP. At the top right, there are navigation links for 'MASUK' (Login) and 'PENDAFTARAN' (Registration). The 'MASUK' button is highlighted with a green box, and an orange arrow points to it from the instructions. Below the navigation, there is a search bar and a main menu with 'Beranda', 'Dasbor', 'Peta', and 'Kematangan'. The main content area features an 'AGENDA' section with dates and locations: FEB 21 BOGOR, FEB 28 PEKANBARU, MAR 14 BANJARMASIN, and MAR 28 GORONTALO. A 'Login' modal is overlaid on the page, containing fields for 'Email', 'Password', and 'Captha Security' (Captcha). The Captcha field shows a distorted image with the text 'yGpU' and a prompt 'ketik ulang' (type again). A green 'Login' button is at the bottom of the modal, with a hand icon pointing to it. The background of the website shows the LKPP logo and a 'PENDAFTARAN' button.

1. Klik menu “Masuk”
2. Masukan “*Email, Password* dan Kode *Captcha*”
3. Klik “Login” untuk login ke dalam aplikasi SIUKPBJ

**\*Note:**  
Hanya akun yang telah diverifikasi oleh admin SIUKPBJ LKPP yang dapat melakukan login

# PENGISIAN PROFIL UKPBJ (1)

Beranda Profil UKPBJ ▾ Dasbor ▾ Peta ▾ Kematangan ▾ Layanan ▾ Pusat Informasi ▾ Kontak

Edit Profile UKPBJ

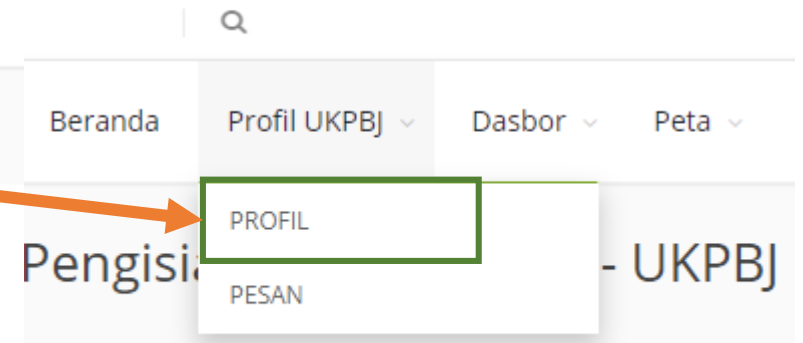
Mohon masukan data valid sesuai dengan isian

Nama UKPBJ	<input type="text" value="UKPBJ X"/>
Tahun Pembentukan	<input type="text" value="2019"/> *4 digit angka tahunan, misal 2015
Dasar Hukum Pembentukan	<input type="text" value="Perbup No. xx Tahun xx"/>
Status Kelembagaan :	<input type="text" value="Struktural"/> ▾
Nomenklatur	<input type="text" value="Pengadaan Barang/Jasa"/>
Bentuk Kelembagaan :	<input type="text" value="Bagian"/> ▾

Pilih Berkas (JPG,PNG,PDF)

Scan File Dasar Hukum Pembentukan

5696_290319100000.pdf	341958 KB	
-----------------------	-----------	--



1. Klik menu “Profil UKPBJ”
2. Pilih sub menu “Profil” untuk mengisi data profil UKPBJ
3. Isi seluruh data profil UKPBJ

# PENGISIAN PROFIL UKPBJ (2)

Jumlah Pokja

3

Jumlah Anggota Pokja

9

Jumlah Pokja Paruh Waktu

3

Jumlah totalSDM UKPBJ

9

Jumlah Pejabat Fungsional PPBJ

3

Jumlah Satker/OPD

3

No Telepon UKPBJ :

0219

9999999

ext

+

[Kode Area+Notelp]

No Fax UKPBJ :

021999999

Link Website

www.apelbaja.com

Alamat UKPBJ :

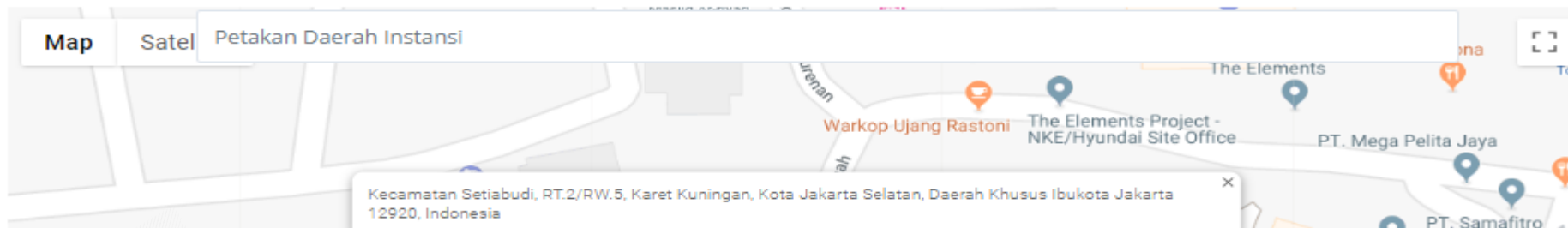
Jl. Epicentrum Tengah No.

Klik “Simpan” untuk menyimpan data profil UKPBJ

**\*Note:**

Seluruh data profil UKPBJ dapat dilihat di menu Peta Persebaran

Lokasi Google Maps (ditampilkan di Peta Persebaran) :



Simpan



# PENGISIAN KEMATANGAN UKPBJ (1)

Beranda Profil UKPBJ Dasbor **Peta** **Kematangan** Layanan Pusat Informasi Kontak

Dasbor Peta Kematangan Layanan Pusat Informasi

## Pengisian Penilaian Mandiri - UKPBJ X

Home • Pengisian Pe

CSV Excel PDF Print

Search:

No	Domain	Variabel	Level	Status	Aksi
1)	Proses	Manajemen Pengadaan	-		<a href="#">Isi</a>
2)	Proses	Manajemen Penyedia	-		<a href="#">Isi</a>
3)	Proses	Manajemen Kinerja	-		<a href="#">Isi</a>
4)	Proses	Manajemen Resiko	-		<a href="#">Isi</a>
5)	Kelembagaan	Pengorganisasian Kelembagaan	-		<a href="#">Isi</a>
6)	Kelembagaan	Tugas & Fungsi	-		<a href="#">Isi</a>
7)	SDM	Perencanaan SDM Pengadaan	-		<a href="#">Isi</a>
8)	SDM	Pengembangan SDM Pengadaan	-		<a href="#">Isi</a>
9)	Sistem Informasi	Sistem Informasi	-		<a href="#">Isi</a>

Showing 1 to 9 of 9 entries

INDEKS KEMATANGAN  
PENGISIAN PENILAIAN MANDIRI  
HASIL PENGISIAN PENILAIAN MANDIRI  
PENGISIAN PETA JALAN  
HASIL PENGISIAN PETA JALAN

**1.** Klik menu “Kematangan”  
**2.** Pilih sub menu “Pengisian Penilaian Mandiri”  
**3.** Klik “Isi” pada masing-masing Variabel untuk melakukan pengisian data kematangan

**\*Note:**  
pengisian kematangan dapat dilakukan secara parsial

# PENGISIAN KEMATANGAN UKPBJ (2)

Beranda Profil UKPBJ ▾ Dasbor ▾ Peta ▾ Kematangan ▾ Layanan ▾ Pusat Informasi ▾ Kontak



## Pengisian Manajemen Pengadaan

### KONDISI SAAT INI

- Pengelolaan proses pemilihan berbasis dokumen pemilihan
- Pengelolaan proses pemilihan berbasis SOP Pemilhan
- Pengelolaan proses PBJ terintegrasi di seluruh mata rantai proses pengadaan dengan berkolaborasi dengan pihak terkait
- Pengelolaan proses PBJ yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran organisasi melalui penerapan PBJ
- Pengelolaan proses PBJ dengan memunculkan berbagai inovasi untuk perbaikan kinerja yang merefleksikan kondisi terkini

### Uraian Kondisi Saat ini

Pengelolaan proses PBJ terintegrasi di seluruh mata rantai proses pengadaan dengan berkolaborasi dengan pihak terkait

Contoh pengisian kematangan variabel **Manajemen Pengadaan:**

1. Pilih opsi level kematangan “Kondisi Saat Ini” (contoh: level 3)
2. Isi “Uraian Kondisi Saat Ini”

#### **\*Note:**

- Opsi pilihan 1-5 merupakan level kematangan (Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis, Unggul)
- Pilih opsi sesuai dengan kondisi terkini

# PENGISIAN KEMATANGAN UKPBJ (3)

No	Level	Bukti Dukung	Keterangan	Aksi
1.	Inisiasi	Dokumen/ laporan proses pemilihan	-	 Unggah File
2.	Esensi	SOP Persiapan Pengadaan	-	Unggah File
3.	Esensi	SOP Pemilihan	-	Unggah File
4.	Proaktif	SOP Perencanaan	-	Unggah File
5.	Proaktif	SOP Pelaksanaan Kontrak	-	Unggah File
6.	Proaktif	Standar 5: Pengelolaan Layanan Helpdesk	-	Unggah File
7.	Proaktif	Standar 9: Pengelolaan Keamanan Perangkat	-	Unggah File
8.	Proaktif	Standar 10: Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan	-	Unggah File
9.	Proaktif	Standar 11: Pengelolaan Kemananan Server dan Jaringan	-	Unggah File
10.	Proaktif	Standar 17: Penilaian Internal	-	Unggah File
11.	Proaktif	Berita acara/notulensi rapat dengan pelaku pengadaan dan atau pelaku usaha	-	Unggah File

Klik “Unggah File” untuk unggah dokumen bukti dukung

**\*Note:**

- Dokumen yg diunggah hanya format PDF/JPG max 5 MB
- Contoh: Jika kondisi kematangan saat ini memilih level 3, maka bukti dukung level 1, 2 dan 3 wajib diunggah
- Seluruh bukti dukung wajib diunggah

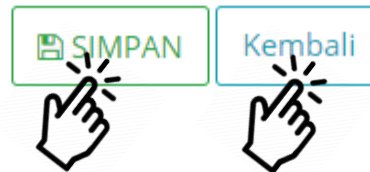
# PENGISIAN KEMATANGAN UKPBJ (4)

## TARGET KONDISI TAHUN DEPAN

- Pengelolaan proses pemilihan berbasis dokumen pemilihan
- Pengelolaan proses pemilihan berbasis SOP Pemilhan
- Pengelolaan proses PBJ terintegrasi di seluruh mata rantai proses pengadaan dengan berkolaborasi dengan pihak terkait
- Pengelolaan proses PBJ yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran organisasi melalui penerapan strategi dan metode yang sesuai
- Pengelolaan proses PBJ dengan memunculkan berbagai inovasi untuk perbaikan kinerja yang merefleksikan ciri organisasi pembelajar

## Uraian Kondisi Target

Pengelolaan proses PBJ yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran organisasi melalui penerapan strategi dan metode yang sesuai



1. Pilihan “Target Kondisi Tahun Depan” otomatis naik satu level dari pilihan “Kondisi Saat Ini”
2. Isi “Uraian Kondisi Target” tahun depan
3. Klik “Simpan” untuk menyimpan pengisian
4. Klik “Kembali” untuk kembali ke halaman awal pengisian kematangan

# PENGISIAN KEMATANGAN UKPBJ (5)

Beranda Profil UKPBJ ▾ Dasbor ▾ Peta ▾ Kematangan ▾ Layanan ▾ Pusat Informasi ▾ Kontak

CSV Excel PDF Print

Search:

No	Domain	Variabel	Level	Status	Aksi
1)	Proses	Manajemen Pengadaan	Proaktif	Revisi	<a href="#">Perbarui</a>
2)	Proses	Manajemen Penyedia	Proaktif	Terverifikasi	<a href="#">Perbarui</a>
3)	Proses	Manajemen Kinerja	Unggul	Pembaharuan	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Kirim</a>
4)	Proses	Manajemen Resiko	Esensi	Menunggu Verifikasi	<a href="#">Lihat</a>
5)	Kelembagaan	Pengorganisasian Kelembagaan	Esensi	Terisi	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Kirim</a>
6)	Kelembagaan	Tugas & Fungsi	Esensi	Terverifikasi	<a href="#">Perbarui</a>
7)	SDM	Perencanaan SDM Pengadaan	Proaktif	Terisi	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Kirim</a>
8)	SDM	Pengembangan SDM Pengadaan	Proaktif	Terisi	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Kirim</a>
9)	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Inisiasi	Menunggu Verifikasi	<a href="#">Lihat</a>

1. Klik “Ubah” untuk mengubah pengisian kematangan
2. Klik “Kirim” untuk mengirim pengisian ke Verifikator LKPP
3. Klik “Lihat” untuk melihat data pengisian kematangan
4. Klik “Perbarui” untuk memperbarui ke level kematangan berikutnya

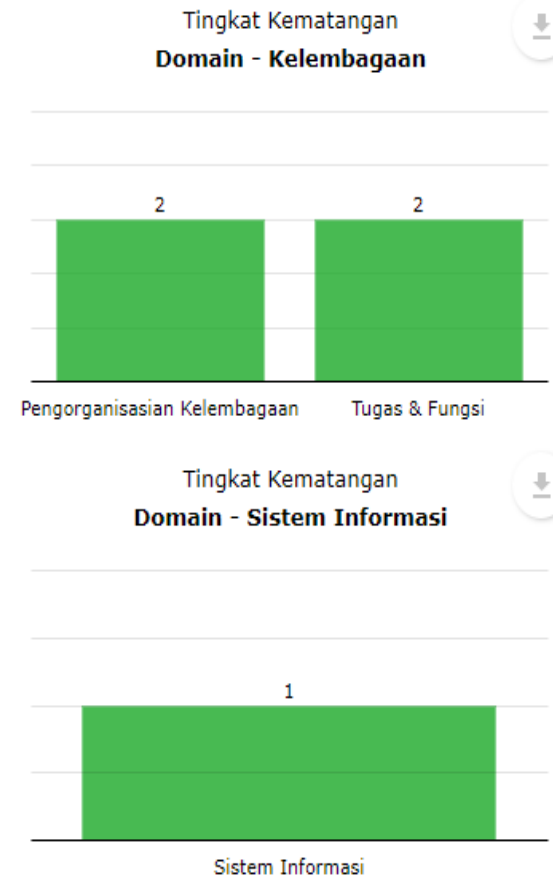
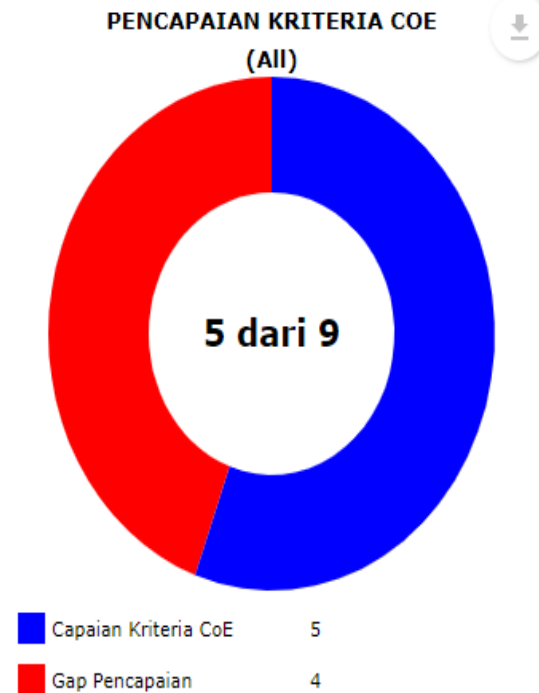
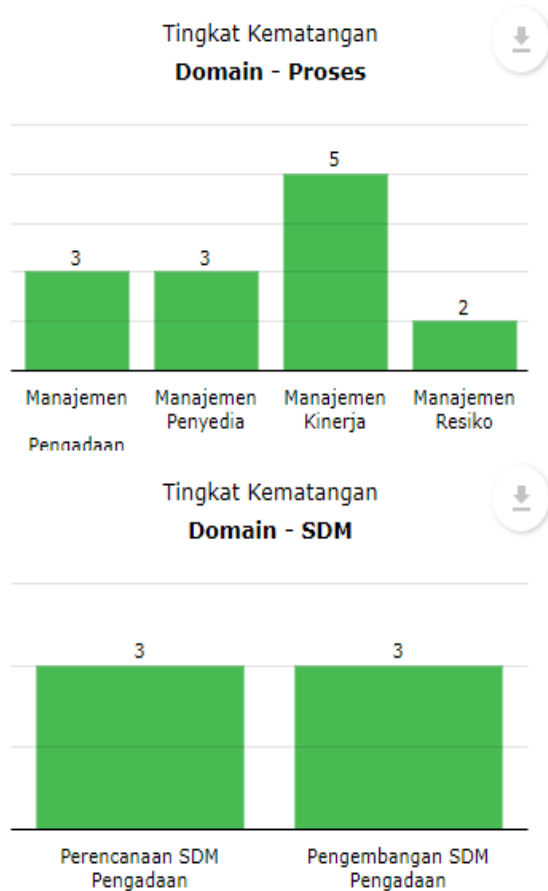
## Keterangan Status:

- Terisi:** pengisian kematangan sudah diisi
- Menunggu Verifikasi:** pengisian kematangan sudah dikirim ke Verifikator LKPP
- Revisi:** pengisian kematangan harus direvisi karena masih belum sesuai
- Terverifikasi:** pengisian kematangan sudah sesuai dan sudah diverifikasi oleh verifikator LKPP
- Pembaharuan:** pengisian kematangan diperbarui ke level berikutnya

# DASBOR UKPBJ

Dasbor UKPBJ

Home • Dasbor UKPBJ



1. Klik menu “Dasbor”
2. Pilih sub menu “Dasbor UKPBJ” untuk melihat kesimpulan level kematangan
3. Kesimpulan level kematangannya adalah: “5 dari 9”

**Artinya** ada 5 variabel yang sudah mencapai kriteria CoE (*Center of Excellence*) atau level 3 (proaktif)

# HASIL PENGISIAN PENILAIAN MANDIRI

## Hasil Pengisian Penilaian Diri Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ UKPBJ X

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria CoE	Tingkat Kematangan Saat Ini	File Bukti Dukung
Proses	1.1 Manajemen Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"><li>Fokus UKPBJ dalam pengelolaan mata rantai UPJ</li><li>Ketersediaan prosedur yang mendukung peran UKPBJ</li></ul>	3	Esensi	Unduh Bukti Dukung
	1.2 Manajemen Penyedia	<ul style="list-style-type: none"><li>Analisis data kinerja penyedia</li><li>Interaksi dan pembinaan ke penyedia</li></ul>	3	Proaktif	Unduh Bukti Dukung
	1.3 Manajemen Kinerja	<ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan penerapan manajemen kinerja</li><li>Pemanfaatan hasil manajemen kinerja bagi kepentingan organisasi</li></ul>	3	Strategis	Unduh Bukti Dukung
	1.4 Manajemen Resiko	<ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan penerapan manajemen resiko dalam mata rantai proses pengadaan barang/jasa</li><li>Pemanfaatan hasil yang diperoleh organisasi dari penerapan manajemen risiko</li></ul>	3	Esensi	Unduh Bukti Dukung
Kelembagaan	2.1 Pengorganisasian	<ul style="list-style-type: none"><li>Kemampuan dalam mendukung visi dan strategi organisasi</li><li>Posisi organisasi UKPBJ</li></ul>	3	Esensi	Unduh Bukti Dukung
	2.2 Tugas dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan layanan yang diberikan, baik ke pihak internal ataupun eksternal</li><li>Sinergi antar fungsi di internal yang dapat menciptakan value bagi organisasi</li></ul>	3	Esensi	Unduh Bukti Dukung
SDM	3.1 Perencanaan SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>Analisis kebutuhan serta pemenuhan kebutuhan SDM</li><li>Rekrutment SDM Pengadaan</li></ul>	3	Proaktif	Unduh Bukti Dukung
	3.2 Pengembangan SDM/td>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan kompetensi SDM PBJ</li><li>Pembinaan stakeholder PBJ untuk mendukung pencapaian kinerja pengadaan</li></ul>	3	Proaktif	Unduh Bukti Dukung
Sistem Informasi	4.1 Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan otomasi proses pengadaan barang/jasa</li><li>Ketersediaan data dan informasi pengadaan bagi stakeholder</li></ul>	3	Inisiasi	Unduh Bukti Dukung

1. Klik menu “Kematangan”
2. Pilih sub menu “Hasil Pengisian Penilaian Mandiri” untuk melihat rangkuman pengisian kematangan
3. Dokumen bukti dukung yang sudah terverifikasi dapat diunduh



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

# Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan  
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
2019

# STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

**Dasar Hukum**

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018  
tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

**Deskripsi**

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L/Pemda & Pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia

**Fokus**

- Perijinan dan tata niaga;
- Keuangan negara; dan
- Penegakan hukum & reformasi birokrasi

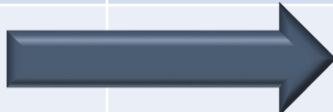

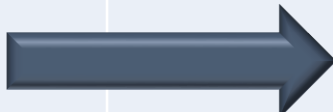
**Tantangan & Sasaran**

**Tantangan :** PBJ belum independen dan didukung SDM yang profesional  
**Sasaran :** Meningkatnya independensi, transparansi dan akuntabilitas proses PBJ



SKB KPK, KSP, KEMENDAGRI, BAPPENAS, KEMENPANRB  
TENTANG  
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020

**LAMPIRAN SKB KPK, KSP, KEMENDAGRI, BAPPENAS, KEMENPANRB  
TENTANG AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019 -2020**

No	AKSI	PENANANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
7	Peningkatan Profesionalisme Dan Modernisasi Penagdaan Barang Dan Jasa	1. LKPP 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian PAN dan RB 4. Seluruh Pemerintah Daerah	Seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Tercapainya tingkat kematangan UKPBJ minimal level 3 di 100 Kementerian/Lem baga/Pemerintah Daerah (34 Provinsi, 12K/L dan 54 kabupaten/kota)	<p>1 Terbitnya <b>regulasi tentang pembentukan UKPBJ di kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.</b></p>
					2. Terbentuknya <b>UKPBJ struktural di Kementerian/Lembaga dan Pemda.</b>
					3. Terpenuhinya <b>jabatan fungsional pengadaan</b> di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemda.
					4. <b>Dialihkannya seluruh anggota Pokja pengadaan</b> barang dan jasa di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi <b>pejabat fungsional pengadaan</b> di UKPBJ.
					5. Dilaksanakannya <b>pengukuran kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di 100</b> Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12, B15, B18, B21, B24	DATA PENDUKUNG	
	1	2	3	4	5	6 (Final)	9	
A	KEUANGAN NEGARA							
	Peningkatan Profesionilitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Seluruh Pemerintah Daerah	Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Tercapainya tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa minimal pada level 3 di 100 Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (34 Provinsi, 12K/L dan 54 kabupaten/kota)	1. <b>Terbitnya regulasi tentang pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.</b>	B03 Disosialisasikannya Permendagri tentang Pembentukan UKPBJ di Pemerintah Daerah (UK-Kemendagri) B06 1. Terbitnya Permenpan RB tentang Pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga (UK- Kemenpan RB) 2. Sosialisasi Permenpan RB tentang pembentukan UKPBJ	Bukti sosialisasi Permendagri tentang pembentukan UKPBJ Pemda  1. Dokumen Permenpan-RB tentang pembentukan UKPBJ K/L 2. Bukti sosialisasi Permenpan-RB tentang pembentukan UKPBJ K/L	

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12, B15, B18, B21, B24	DATA PENDUKUNG
	1	2	3	4	5	6 (Final)	9
<b>A</b>	<b>KEUANGAN NEGARA</b>						
	Peningkatan Profesionilitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Seluruh Pemerintah Daerah	Seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Tercapainya tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa minimal pada level 3 di 100 Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (34 Provinsi, 12K/L dan 54 kabupaten/kota)	2. <b>Terbentuknya UKPBJ struktural di Kementerian/Lemba ga dan Pemda.</b>	B03 1. Terbitnya Peraturan Kepala Daerah seluruh Provinsi tentang UKPBJ struktural (UK-Pemerintah Provinsi) - 34 Provinsi B06 Terbitnya Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang UKPBJ struktural di 7 Kabupaten/Kota (UK-Pemerintah Kabupaten/Kota) B09 1. Terbitnya Revisi Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga tentang Pembentukan UKPJ Struktural di 12 K/L yang menjadi sasaran program Modernisasi Pengadaan 2. Terbitnya Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang UKPBJ struktural di 10 Kabupaten/Kota (UK-Pemerintah Kabupaten/Kota) B12 Terbitnya Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang UKPBJ struktural di 10 Kabupaten/Kota (UK-Pemerintah Kabupaten/Kota) B15 Terbitnya Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang UKPBJ struktural di 10 Kabupaten/Kota (UK-Pemerintah Kabupaten/Kota) B18 Terbitnya Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang UKPBJ struktural di 10 Kabupaten/Kota (UK-Pemerintah Kabupaten/Kota) B21 Terbitnya Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang UKPBJ struktural di 7 Kabupaten/Kota (UK-Pemerintah Kabupaten/Kota)	Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang UKPBJ yang sudah ditandatangani Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang UKPBJ yang sudah ditandatangani 1. Dokumen Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang telah direvisi 2. Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang UKPBJ yang sudah ditandatangani Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang UKPBJ yang sudah ditandatangani Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang UKPBJ yang sudah ditandatangani Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang UKPBJ yang sudah ditandatangani

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12, B15, B18,B21, B24	DATA PENDUKUNG
	1	2	3	4	5	6 (Final)	9
A	KEUANGAN NEGARA						
	Peningkatan Profesionilitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Seluruh Pemerintah Daerah	Seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Tercapainya tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa minimal pada level 3 di 100 Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (34 Provinsi, 12K/L dan 54 kabupaten/kota)	3. <b>Terpenuhinya jabatan fungsional pengadaan di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemda.</b>  4. <b>Dialihkannya seluruh anggota Pokja pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi pejabat fungsional pengadaan UKPBJ.</b>	B03 Tersedianya dokumen analisis beban kerja seluruh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan yang akan diangkat ke dalam JF PPBJ di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi  B06 1. Terisinya sistem e-formasi untuk JF PBJ berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang ada dalam target keberhasilan  2. Tersedianya dokumen analisis beban kerja seluruh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan yang akan diangkat ke dalam JF PBJ di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada dalam target keberhasilan  B09 1. Telah terlaksana proses Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing JF PBJ di semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi 2. Terisinya sistem e-formasi untuk JF PBJ berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota  B12 1, Terlaksananya proses Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing JF PBJ di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 30%) 2. Terlaksananya pengangkatan ke dalam JF PPBJ di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi	Dokumen hasil Analisis Beban Kerja  1. Screenshot input kebutuhan Jafung PBJ ke dalam sistem e-formasi  2. Dokumen hasil Analisis Beban Kerja  1. Bukti pelaksanaan uji kompetensi (resume)  2. Screenshot input kebutuhan Jafung PBJ ke dalam sistem e-formasi  1. Bukti pelaksanaan uji kompetensi (resume)  2. Dokumen rekap pengangkatan JF PBJ yang sudah ditanda tangani atasan terkait

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12, B15, B18, B21, B24	DATA PENDUKUNG
	1	2	3	4	5	6 (Final)	9
A	KEUANGAN NEGARA						
	Peningkatan Profesionilitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Seluruh Pemerintah Daerah	Seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Tercapainya tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa minimal pada level 3 di 100 Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (34 Provinsi, 12K/L dan 54 kabupaten/kota)	<b>3. Terpenuhinya jabatan fungsional pengadaan di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemda.</b>  <b>4. Dialihkannya seluruh anggota Pokja pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi pejabat fungsional pengadaan UKPBJ.</b>	B15 1. Terlaksananya proses Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing JF PPBJ di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (50%) 2. Terlaksananya pengangkatan ke dalam JF PPBJ pada semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah selesai melaksanakan uji kompetensi	1. Bukti pelaksanaan uji kompetensi (resume)  2. Dokumen rekap pengangkatan JF PBJ yang sudah ditanda tangani atasan terkait
						B18 1. Terlaksananya proses Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing JF PBJ di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (80%) 2. Terlaksananya pengangkatan ke dalam JF PBJ pada semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah selesai melaksanakan uji kompetensi 3. Tersedianya Peraturan Kepala Daerah mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan bagi JF PBJ di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Bukti pelaksanaan uji kompetensi (resume)  2. Dokumen rekap pengangkatan JF PBJ yang sudah ditanda tangani atasan terkait  3. Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang UKPBJ yang sudah ditandatangani Pemberian Tambahan Penghasilan bagi JF PBJ
						B21 1. Terlaksananya proses Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing JF PBJ di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (100%) 2. Terlaksananya pengangkatan ke dalam JF PBJ pada semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah selesai melaksanakan uji kompetensi	1. Bukti pelaksanaan uji kompetensi (resume)
							2. Dokumen rekap pengangkatan JF PBJ yang sudah ditanda tangani atasan terkait

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12, B15, B18, B21, B24	DATA PENDUKUNG
	1	2	3	4	5	6 (Final)	9
<b>A</b>	<b>KEUANGAN NEGARA</b>						
	Peningkatan Profesionilitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Seluruh Pemerintah Daerah	Seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Tercapainya tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa minimal pada level 3 di 100 Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (34 Provinsi, 12K/L dan 54 kabupaten/kota)	<b>5. Dilaksanakannya pengukuran kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di 100 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah</b>	B03 1. Terdiseminaskannya pedoman pengukuran kematangan UKPBJ oleh LKPP kepada seluruh K/L dan Pemda  2. Penetapan 100 K/L dan Pemda yang menjadi sasaran pengukuran tingkat kematangan UKPBJ (berbasis resiko)  B06 1. Terlaksananya penilaian mandiri 100 K/L/Pemda  2. Tersusunnya rencana aksi peningkatan kematangan 100 K/L/Pemda  3. Tersusunnya Agenda Prioritas  B09-B21 Laporan kemajuan pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ di 100 K/L dan Pemda menuju Level 3  B24 Tercapainya tingkat kematangan UKPBJ level 3 di 100 K/L/Pemda	1. Laporan diseminasi pedoman pengukuran kematangan UKPBJ di K/L dan Pemda  2. Daftar 100 K/L dan Pemda yang menjadi sasaran pengukuran tingkat kematangan UKPBJ  1. . Dokumen rekap hasil penilaian mandiri 100 K/L/Pemda  2. Dokumen rencana aksi  3. Dokumen agenda prioritas  Laporan pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ K/L/Pemda menuju level 3  Resume laporan 100 K/L/Pemda yang mencapai tingkat kematangan 3 yang telah ditandatangani pejabat terkait

# RENCANA AKSI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

**Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: .....**

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN/AKTIVITAS	BUKTI/DOKUMEN DUKUNG	TARGET WAKTU	PIC
1	Penghitungan kebutuhan formasi JF PPBJ sebagai Pokja Pemilihan di UKPBJ dan Pejabat Pengadaan di Satker/OPD	1. Melakukan Analisis Jabatan (Anjab)	Hasil Anjab untuk setiap jenjang JF PPBJ		Unit Organisasi koordinasi dengan UKPBJ dan Unit Kepegawaian
		2. Menyusun Peta Jabatan	Dokumen Peta Jabatan		Unit Organisasi
		3. Melakukan Analisis Beban Kerja (ABK) menggunakan Perka LKPP No. 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi JF PPBJ	Hasil ABK berupa kebutuhan formasi per jenjang JF PPBJ		Unit Organisasi koordinasi dengan UKPBJ dan Unit Kepegawaian
		4. Menginput hasil penghitungan ABK pada e-formasi Kemen PAN-RB sdma.menpan.go.id sebagai syarat pengajuan Penyesuaian/Inpassing	Screenshot pengisian e-formasi pada sdma.menpan.go.id	Paling lambat pengajuan Penyesuaian/ Inpassing JF PPBJ Oktober 2020	Unit Kepegawaian dan UKPBJ

# RENCANA AKSI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

**Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah:** .....

NOs	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN/AKTIVITAS	BUKTI/DOKUMEN DUKUNG	TARGET WAKTU	PIC
2	Pangkatan JF PPBJ	1. Pengangkatan melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing JF PPBJ a. Mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan Penyesuaian/Inpassing b. Menunjuk Admin Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pengajuan Penyesuaian/Inpassing melalui ppsdm.lkpp.go.id c. Mengajukan PNS yg diusulkan mengikuti Penyesuaian/Inpassing d. PNS yang diusulkan Penyesuaian/Inpassing mengikuti Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing	1. Admin mengajukan Penyesuaian/Inpassing pada situs LKPP ppsdm.lkpp.go.id yang menunjukkan sudah mengisi formasi per jenjang sesuai formasi yang diinput pada e-formasi Kemen PAN-RB 2. Admin mendaftarkan PNS yg diusulkan mengikuti Penyesuaian/Inpassing 3. Admin memilih jadwal Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing 4. Peserta yang lulus Uji Kompetensi diangkat ke dalam JF PPBJ	Paling lambat pengajuan Penyesuaian/Inpassing JF PPBJ Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Kepegawaian</li> <li>• UKPBJ</li> </ul>
		2. Usulan pengangkatan melalui formasi CPNS	Usulan pengajuan formasi JF PPBJ setiap penerimaan CPNS	Setiap penerimaan CPNS	Unit Kepegawaian
		3. Usulan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain	Usulan perpindahan dari jabatan lain ke JF PPBJ	sepanjang waktu	Unit Kepegawaian

**Terima Kasih**